

Nama : M. Dimas Syaputra
NPM : 2213031012
Kelas : A
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S. Pd., M.Pd.
Drs. Nurdin, M.Si.
Meyta Pritandari., S.Pd., M.Pd.

STUDY CASE

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawaban : Kegagalan implementasi *Making Indonesia 4.0* dapat dianalisis menggunakan teori Kebijakan Industri Selektif dan Teori Kapasitas Negara (*State Capacity*). Secara teori, kebijakan industri yang efektif harus memiliki koordinasi kelembagaan yang kuat, namun MI 4.0 terlihat sebagai kebijakan *top-down* yang terlalu berfokus pada teknologi tanpa dukungan *conduct* pemerintah yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan insentif digitalisasi gagal mengatasi hambatan struktural yang lebih mendasar, seperti masalah logistik yang mahal, ketersediaan energi yang tidak terjamin, dan defisit SDM digital, sebagaimana dikritik dalam kajian kebijakan industri Indonesia. Selain itu, kegagalan juga terletak pada selektivitas yang kurang tepat; kebijakan ini memilih lima sektor prioritas tetapi gagal memberikan perlindungan atau dukungan *targeted* dan kondisional yang memadai (seperti subsidi R&D atau kredit murah terikat kinerja ekspor). Akibatnya, kebijakan hanya bersifat *promosional* dan *horizontal* (berlaku umum), tidak cukup kuat untuk mengubah struktur biaya dan keuntungan sektor prioritas, yang membuat mereka tetap rentan terhadap persaingan global yang lebih efisien.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawaban : Pendekatan kebijakan industri Indonesia, khususnya MI 4.0, sangat kontras dengan efektivitas intervensi yang dilakukan Korea Selatan (Korsel) dan Vietnam. Korsel berhasil melalui model Negara Pembangunan (*Developmental State*) yang menerapkan kebijakan selektif vertikal dan kondisionalitas kinerja yang ketat. Pemerintah Korsel

memberikan dukungan finansial besar kepada *Chaebol* (konglomerat) dengan syarat mutlak: mereka harus mencapai target ekspor global dan investasi R&D, menciptakan *reward and punishment* yang kuat. Sementara itu, Vietnam berhasil dengan pendekatan yang sangat pragmatis, yaitu Integrasi Cepat ke Rantai Nilai Global (GVCs), fokus pada penyederhanaan birokrasi, penyediaan infrastruktur yang efisien, dan insentif pajak yang sangat spesifik untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berorientasi ekspor. Perbedaan utamanya adalah fokus pada *export-performance* dan kedalaman intervensi; kebijakan Indonesia cenderung terlalu umum dan kekurangan *enforcement*, sehingga gagal menciptakan *linkages* yang kuat dan menggerakkan pertumbuhan manufaktur yang didorong oleh pasar global.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban : Kebijakan industri alternatif yang kontekstual bagi Indonesia harus bersifat struktural dan terfokus pada fondasi *resource-based* sebagai jembatan menuju Industri 4.0, sejalan dengan rekomendasi yang mengedepankan pembangunan berbasis agroindustri. Strategi ini dinamakan Akselerasi Hilirisasi Industri Penuh (*Deep Resource-Based Industrialization*). Rasionalnya adalah Indonesia harus memanfaatkan keunggulan komparatifnya yang melimpah (SDA seperti nikel, bauksit, dan sawit) untuk menciptakan nilai tambah ganda sebelum deindustrialisasi semakin parah. Instrumen kebijakannya meliputi: Pertama, Insentif Pajak *Super Deduction* (misalnya pemotongan pajak 300%) yang dikaitkan secara eksklusif dengan investasi R&D, pelatihan *upskilling* SDM lokal, dan sertifikasi ramah lingkungan di sektor hilirisasi. Kedua, penguatan Regulasi *Anti-Deindustrialisasi* melalui Pajak Ekspor Progresif yang sangat tinggi pada bahan baku mentah untuk memaksa investor melakukan pengolahan di dalam negeri. Ketiga, penetapan Kebijakan Energi dan Logistik Murah dan Stabil yang secara eksplisit disubsidi untuk industri hilirisasi dan manufaktur, memastikan *cost reduction* dan menciptakan daya tarik yang kuat bagi investasi, sehingga secara bertahap membangun basis modal yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi 4.0 secara efektif dan massal.